

**EFEKTIVITAS KOLABORASI PEMERINTAH DESA BERSAMA BPD
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA**

(Studi Di Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan)

SISMA DIANTY

email : diantysisma@gmail.com

Universitas Palangka Raya

ABSTRACT

This research discusses the effectiveness of collaboration between the Village Government and the Village Consultative Body (BPD) in an effort to improve infrastructure development in Patas I Village, Gunung Bintang Awai Sub-district, South Barito Regency. This research uses a descriptive qualitative method to provide a factual and accurate picture of the effectiveness of the collaboration. Data were obtained through observations, interviews, and documentation with purposive sampling techniques, involving the Village Head, Deputy BPD, and the local community as the main informants.

The results show that the effectiveness of collaboration between the Village Government and BPD in village infrastructure development is strongly influenced by several factors, such as timeliness, cost calculation, measurement, and determination of development goals and objectives. The main supporting factors in this collaboration include good communication between the village government and BPD, active community involvement, and the availability of sufficient funds. However, this study also identified several inhibiting factors, such as budget limitations, lack of competent human resources, and administrative constraints.

Based on the findings of this study, it is recommended that the village government and BPD improve synergy through more careful planning, budget transparency, and increased human resource capacity in village infrastructure development management. Thus, village development can run more effectively and provide maximum benefits to the community.

Keywords: Effectiveness, Collaboration, Village Government, BPD, Development

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran faktual dan akurat mengenai efektivitas kolaborasi tersebut. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, melibatkan Kepala Desa, Wakil BPD, serta masyarakat setempat sebagai informan utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur desa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketepatan waktu, perhitungan biaya, pengukuran, serta penentuan sasaran dan tujuan pembangunan. Faktor pendukung utama dalam kolaborasi ini meliputi komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD, keterlibatan aktif masyarakat, serta ketersediaan dana yang cukup. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta kendala administratif.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Desa dan BPD meningkatkan sinergi melalui perencanaan yang lebih matang, transparansi anggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen pembangunan infrastruktur desa. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kata kunci : Efektivitas, Kolaborasi, Pemerintah Desa, BPD, Pembangunan

Submitted: 26-03-2025 | Accepted: 26-03-2025 | Published: 31-03-2025

1. Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran langsung dalam melayani masyarakat desa. Sebagai unit pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat, keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kinerja perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, serta perangkat desa lainnya yang memiliki tugas utama dalam mengelola dan mengembangkan desa demi kesejahteraan masyarakatnya.

Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa bertanggung jawab atas berbagai aspek pembangunan, baik infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun budaya. Efektivitas kepemimpinan kepala desa menjadi faktor kunci dalam menentukan kemajuan desa. Selain itu, keberadaan BPD sangat penting sebagai lembaga legislatif desa yang berperan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis. BPD bertugas menampung, mengakomodasi, serta menyosialisasikan aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, BPD memiliki fungsi utama untuk melaksanakan musyawarah desa guna membahas dan menyepakati kebijakan strategis bersama Kepala Desa. Pemerintah desa sendiri berfungsi sebagai eksekutif desa, sementara BPD sebagai legislatif desa, yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera (Kusuma, 2013).

Pembangunan desa tidak dapat terlepas dari peran sumber daya manusia yang potensial. Dalam konteks ini, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, serta perangkat desa lainnya memiliki peran strategis dalam keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan dan ketertiban. Komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

BPD sebagai hasil reformasi bertujuan untuk mewujudkan demokrasi di tingkat desa. Keberadaan BPD sangat berpengaruh dalam pemerintahan desa, terutama dalam menggali, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, BPD menjadi harapan utama masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh BPD tidak akan tersalurkan secara efektif tanpa

adanya kerja sama yang harmonis dengan Pemerintah Desa. Ketidakharmisan antara keduanya dapat menghambat pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh nyata adalah kondisi di Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini terdiri dari satu dusun, yaitu Dusun Mulajari yang terletak di KM 26. Desa Patas I telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani karet, rotan, padi, sayur, serta pedagang dan pekerja sektor lainnya.

Namun, dalam pengamatan awal, ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur jalan utama di Desa Patas I masih belum menjadi prioritas meskipun sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana utama dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial. Keterlambatan pemerintah desa dalam menanggapi permasalahan ini menyebabkan pembangunan dianggap kurang tepat sasaran dan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Padahal, pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di desa, di antaranya:

- ✓ Pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- ✓ Infrastruktur jalan yang baik menjadi strategi untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
- ✓ Peningkatan atau perbaikan sarana transportasi dapat menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
- ✓ Meningkatnya mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan infrastruktur jalan yang memadai.

Berdasarkan pengamatan langsung, capaian pembangunan di Desa Patas I masih belum maksimal, terutama dalam hal infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di

beberapa bagian. Sebagian besar jalan masih berupa tanah, yang menyulitkan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD sangat penting dalam meningkatkan pembangunan desa, khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

Dengan demikian, hubungan yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan fisik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara kedua lembaga ini juga berperan dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan transparan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Literlure Rivew

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam kajian ini. Beberapa studi yang relevan meliputi:

- ✓ Nurwahidah & Zedi Muttaqin (2018) – Meneliti kerja sama BPD dan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa di Desa Ncandi, Bima. Hasilnya menunjukkan kerja sama yang cukup baik, meskipun terdapat kendala dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- ✓ Melysa Nurfadillah & Siti Fatimah (2022) – Menganalisis kerja sama Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan di Desa Sari Mulya, Kabupaten Tanah. Studi ini menemukan bahwa kerja sama belum maksimal dan perlu perbaikan dalam keterbukaan, delegasi tugas, dan penyelesaian konflik.
- ✓ Rizqillah (2017) – Meneliti kerja sama Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Kepala Sungai, Langkat. Ditemukan bahwa peran BPD cukup baik, tetapi masih terdapat kendala dalam SDM dan partisipasi masyarakat.
- ✓ Rahmadani et al. (2021) – Menganalisis kerja sama Kepala Desa dan BPD dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Karangpatihan, Ponorogo. Fokus penelitian ini adalah program sosial dan ekonomi untuk penyandang disabilitas.

- ✓ Adriasyah (2017) – Meneliti peran BPD dalam pengawasan pembangunan di Desa Kuala Lapang, Malinau Barat. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun BPD telah menjalankan fungsinya, terdapat kendala dalam disiplin anggota, hubungan dengan pemerintah desa, dan keterbatasan SDM.

Persamaan dari penelitian-penelitian ini adalah fokusnya pada kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan desa. Perbedaannya terletak pada aspek yang dikaji, seperti pengelolaan dana, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan. Studi ini berkontribusi dengan meneliti efektivitas kolaborasi Pemerintah Desa dan BPD dalam meningkatkan pembangunan di Desa Patas I, Barito Selatan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan efektivitas kolaborasi Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur di Desa Patas I. Menurut Nazir (2011), metode deskriptif bertujuan memberikan gambaran faktual dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Moleong (2011) menekankan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menginterpretasikan fenomena yang terjadi dengan pendekatan mendalam terhadap subjek penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil Penelitian

Evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur Desa Patas I dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek berikut:

1. Ketepatan Waktu dalam Pelaksanaan Proyek

Pembangunan infrastruktur di Desa Patas I telah berjalan cukup efektif sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah Desa dan BPD menunjukkan disiplin dalam menjalankan tugas masing-masing, memastikan proyek berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat kendala administratif seperti keterlambatan pencairan dana desa yang menyebabkan proyek tertunda. Koordinasi lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi hambatan birokrasi guna memastikan kelancaran proyek di masa mendatang.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya dan Anggaran

Dalam hal anggaran, Pemerintah Desa dan BPD telah berusaha menyesuaikan pengalokasian dana dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih ditemukan kendala dalam perhitungan biaya akibat keterbatasan dana yang tersedia. Beberapa proyek mengalami penyesuaian dalam skala dan kualitas material yang digunakan, sehingga menimbulkan potensi perbedaan antara rencana awal dan hasil akhir pembangunan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan transparansi dan optimalisasi penggunaan anggaran desa.

3. Ketepatan Pengukuran dalam Pelaksanaan Pembangunan

Efektivitas kolaborasi diukur dengan melihat tanggung jawab masing-masing pihak dalam berbagai bidang. Pemerintah Desa berperan dalam perencanaan dan pengawasan teknis, sementara BPD memberikan kontrol dan pengawasan terhadap implementasi proyek. Meskipun secara umum pengukuran dan perencanaan berjalan dengan baik, masih terdapat kendala dalam pemahaman peran, terutama dalam keterlibatan BPD dalam tahap perencanaan teknis. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota BPD menjadi kebutuhan mendesak agar mereka dapat berkontribusi lebih optimal.

4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan Prioritas Pembangunan

Prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur desa adalah pembangunan jalan setapak, jembatan kecil, dan drainase untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan dilakukan secara bertahap. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa pembangunan belum merata atau belum menyentuh wilayah mereka. Oleh karena itu, perencanaan strategis yang lebih inklusif diperlukan agar seluruh wilayah desa dapat memperoleh manfaat secara merata.

5. Ketepatan Berpikir dalam Mengatasi Kendala

Dalam merancang strategi pembangunan, Pemerintah Desa dan BPD menggunakan data dan masukan dari masyarakat sebagai basis perencanaan. Namun, tantangan dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia dan teknis masih menjadi hambatan. Pemerintah Desa dan BPD mengadopsi pendekatan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi kendala ini. Ke depan, perlu adanya peningkatan dalam metode pengumpulan data dan penyusunan prioritas pembangunan agar lebih berbasis pada kebutuhan yang terukur.

6. Ketepatan dalam Memberikan Perintah dan Arahan

Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan instruksi yang jelas kepada perangkat desa dan pelaksana proyek. Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada perencanaan dan anggaran, tetapi juga pada efektivitas komunikasi antara Kepala Desa, BPD, dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan kurangnya koordinasi antara pihak yang terlibat, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur perlu diterapkan.

7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan Pembangunan

Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur di Desa Patas I adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik. Meskipun pembangunan sudah berjalan dengan baik, keterbatasan anggaran dan keterlambatan dalam pelaksanaan masih menjadi tantangan. Pemerintah Desa telah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan secara bertahap hingga seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat terpenuhi. Namun, perlu adanya evaluasi berkala agar tujuan pembangunan tetap relevan dengan kondisi desa yang terus berkembang.

8. Ketepatan Sasaran dalam Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur telah berjalan sesuai dengan rencana kerja desa yang telah disusun sebelumnya. Namun, masih terdapat beberapa keluhan dari masyarakat terkait ketidakmerataan pembangunan, di mana beberapa daerah belum mendapatkan perhatian yang cukup. Fokus yang lebih besar pada pembangunan jalan setapak juga menuai pro dan kontra, mengingat beberapa wilayah justru lebih membutuhkan pembangunan fasilitas umum lainnya seperti saluran irigasi atau penerangan jalan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat diperlukan agar pembangunan benar-benar bermanfaat bagi semua pihak.

Pembahasan Penelitian

Efektivitas kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur desa Patas I dievaluasi berdasarkan beberapa aspek:

1. Ketepatan Waktu – Pembangunan telah berjalan cukup efektif sesuai regulasi. Kedua pihak disiplin dalam tugas masing-masing, memastikan proyek berjalan lancar meskipun ada tantangan dalam koordinasi.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya - Pemerintah Desa dan BPD menyesuaikan anggaran dengan regulasi, meski masih ada kendala keterbatasan dana yang membuat perhitungan biaya belum optimal.
3. Ketepatan Pengukuran - Pengukuran efektivitas kolaborasi dilakukan dengan memperhatikan tanggung jawab di berbagai bidang, yang sudah berjalan baik tetapi tetap membutuhkan peningkatan pemahaman peran.
4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan - Infrastruktur jalan menjadi prioritas utama, tetapi keterbatasan dana menyebabkan pembangunan dilakukan bertahap, menimbulkan ketidakpuasan sebagian masyarakat.
5. Ketepatan Berpikir - Basis data digunakan untuk merencanakan pembangunan, dengan strategi musyawarah dan mufakat sebagai solusi dalam menghadapi kendala.
6. Ketepatan dalam Memberikan Perintah - Kepala desa memainkan peran penting dalam memberikan arahan dan memastikan keberlanjutan pembangunan, termasuk upaya membangun kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur.
7. Ketepatan Menentukan Tujuan - Tujuan utama adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Meskipun pembangunan belum merata, pemerintah desa berkomitmen melanjutkan proyek secara bertahap.
8. Ketepatan Sasaran - Infrastruktur yang dibangun sudah sesuai dengan rencana kerja desa, tetapi ketidakmerataan pembangunan dan fokus pada jalan setapak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur Desa Patas I telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Beberapa aspek yang telah berjalan baik meliputi kedisiplinan dalam pelaksanaan proyek, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam beberapa hal, seperti:

- ✓ Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa.

- ✓ Perhitungan biaya yang lebih akurat agar proyek berjalan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- ✓ Pemilihan proyek yang lebih berbasis pada kebutuhan prioritas masyarakat.
- ✓ Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.

Dengan adanya upaya perbaikan dan evaluasi berkala, diharapkan pembangunan infrastruktur desa dapat semakin efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory. Volume; 543 571.
- Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota , Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6
- Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Belajar.
- Desni, a. (2018). Kolaborasi pemerintah desa dan lembaga adat terhadap pelestarian kearifan lokal di desa bandur picak kecamatan koto kampar hulu kabupaten Kampar.
- HB Sutopo, (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan terapannya dalam peneliian. Surakarta: UNS Press.
- Nawawi, H. (1984). Administrasi pendidikan. Jakarta: Gunung Agung
- Makmur, 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama
- Masruri, 2011. Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkoaan (PNPN-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010).
- Moh Nazir, Metode Penelitian. Cetakan 6. Penerbit Galia Indonesia. Bogor.
- Moleong, J. Lexi. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosyda karya. Bandung
- Soekanto, Soejono. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: P Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Sumber Jurnal :
- Ansell, Chris., & Gash, Alison. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.

Febrian, r, A. (2016). Collaborative governance dalam pembangunan Kawasan perdesaan. *Wedana jurnal pemerintah, politik dan birokrasi*, I, 200-208.

Kusuma, a. (2013). Kemitraan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat dalam pemanfaatan limbah rumah tangga di desa beji, kecamatan boyolunggu, kabupaten tulungagung. *Jurnal administrasi publik mahasiswa universitas brawijaya*, 1(4),

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa